



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : INSPEKTORAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TORNANDA SYAIFULLAH**
2. Jabatan : **INSPEKTUR JENDERAL**
3. NHK : **82476**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. **11.250.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 336 m²/250 m² di KAB / KOTA ---, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 162 m²/300 m² di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m²/300 m² di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 3.750.000.000
4. Tanah Seluas 314 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. **822.400.000**

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 2.400.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.4 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
4. MOBIL, HONDA CRV 1.5 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. **250.000.000**

D. SURAT BERHARGA

Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. **313.999.823**

F. HARTA LAINNYA

Rp. **----**

Sub Total

Rp. **12.636.399.823**



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggali Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : INSPEKTORAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IVY SILFIA IRANI
2. Jabatan : SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL
3. NHK : 71832

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.266.710.000

1. Tanah Seluas 441 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 136.710.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 67 m2/23 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 93.650.000

1. MOTOR, HONDA BLADE SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOBIL, KIA PICANTO MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 2.900.000
4. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 6.250.000
5. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 13.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 77.514.430



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.451.374.430
III. HUTANG	Rp.	372.880.237
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.078.494.193

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : INSPEKTORAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TEUKU NILWAN**
2. Jabatan : **INSPEKTUR I**
3. NHK : **83476**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **2.904.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m²/145 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 776.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 35 m²/35 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 351.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m²/36 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 451.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m²/80 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 227.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m²/28 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 147.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 49.39 m²/96.8 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 952.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **139.200.000**

1. MOBIL, HONDA JAZZ GK5 1,5 RS MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 124.000.000
2. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 3.200.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **58.227.825**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **962.317.325**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ---
Rp. 4.063.745.150

III. HUTANG

Rp. ---
Rp. 4.063.745.150

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : INSPEKTORAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LUTFI
2. Jabatan : INSPEKTUR II
3. NHK : 68269

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 2.746.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 472 m2/139 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.597.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 37 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 200.500.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 53 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 252.500.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 50 m2/39 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 242.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 454.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 109.000.000

1. MOTOR, YAMAHA VEGA R 1FDC CAST WHEEL Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2017, LAINNYA Rp. 105.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 95.900.000

D. SURAT BERTHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 433.075.553

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 3.384.475.553

III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.384.475.553

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : INSPEKTORAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WAHJUDI POERWANTO
2. Jabatan : INSPEKTUR III
3. NHK : 103223

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.050.000.000

1. Tanah Seluas 48 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah Seluas 985 m2 di KAB / KOTA TRENGGALEK, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
4. Tanah Seluas 574 m2 di KAB / KOTA TRENGGALEK, WARISAN Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 115.000.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 125 CC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 39.400.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 1.728.966.788

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.933.366.788

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.933.366.788



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : INSPEKTORAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LINA HERLINA
2. Jabatan : INSPEKTUR IV
3. NHK : 78166

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.425.225.000

1. Tanah Seluas 815 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 572.130.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 350 m2/21 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 508.095.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/36 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/36 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 122 m2/59 m2 di KAB / KOTA KOTA BOGOR , HASIL SENDIRI Rp. 845.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 256.500.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
2. MOBIL, TOYOTA MPV RAIZE Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 157.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 109.164.140

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.947.889.140

III. HUTANG

Rp. 526.038.251

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.421.850.889



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)
UNIT KERJA : KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ADY SOESENSO**
2. Jabatan : **INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH**
3. NHK : **506765**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **6.440.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 287 m2/550 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 5.050.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/68 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.390.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **215.250.000**

1. MOBIL, HONDA CRV MINIBUS Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 110.200.000
2. MOBIL, HONDA BRIO MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 105.050.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **28.000.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **225.012.000**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **6.908.262.000**

III. HUTANG Rp. **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **6.908.262.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



III. HUTANG

Rp. 1.000.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 11.636.399.823

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.